

- Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia* (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2015).
- G. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021).
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia, 2008).
- Mahmuzar, *Sistem pemerintahan Indonesia: menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen*, Cet. 1 (Ujungberung, Bandung: Nusa Media, 2010).
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Penerbit Mataram University Press, 2020).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- W. Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009).
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

JURNAL

Amaliyah, Ainul, and Istiqamah Istiqamah. 2021. "Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata".

Alauddin Law Development Journal 3 (2).

Gindo Cahayo, R., Ayu Pratiwi, D., & Fauziah, H. (2025).

Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Kasus Perdata: Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(3).

Iska Tirta Adiyaksa dan Dossy Iskandar Prasetyo, "Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Studi pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo," *DE RECHT Journal of Police and Law Enforcement* 1, no. 1 (September 2023): 11.

Marlen Novita Makalew, Sarah Sambiran, dan Welly Waworundeng, "Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado," *JURNAL GOVERNANCE* 1, no. 1 (2021): 9.

Muhamad Hasan Pakaja, Ronald J. Mawuntu, dan Caecilia J.J. Waha, "Implementasi Peran Jaksa Pengacara Negara Yang Profesional Dan Akuntabel Dalam Pemulihan Kerugian Negara," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 16.

Musdalifah Asiyatum Syafaat, AldillaYulia Wiellys Sutikno, dan Mariya Asiz, "Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum diKejaksaan Negeri Sorong," *Equality Before The Law*, t.t., 14.

Qoonitah Amri, Sartika Dewi, dan Muhamad Abas, "Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Perwakilan RSUD Karawang dalam Kasus Wanprestasi," *WIDYA YURIDIKA : JURNAL HUKUM* 8, no. 1 (2025): 10.

Raul Gindo Cahayo, Dian Ayu Pratiwi, dan Hermalia Fauziah,
"Implementasi Peran Kejaksaan sebagai Pengacara
Negara dalam Kasus Perdata," *Jurnal Sosial dan Sains*
(SOSAINS), Vol. 5, No. 3 (Maret 2025).

Sitepu, A., Sulaiman, S., & Yulia, Y. (2024). IMPLEMENTASI
TUGAS KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA
NEGARA DALAM MENYELESAIKAN KASUS
PERDATA DI LUAR PENGADILAN (STUDI
PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI ACEH
TENGAH).

Suloh: *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum,
Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan
Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang
Jaksa Pengacara Negara

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum,
Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum
dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha

Negara (Mengatur tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara)

INTERNET DAN LAIN-LAIN

Aida Mardatillah, “Bahasa Hukum: Jaksa Pengacara Negara,” *Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara*, 24 Januari 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-lt61ee84de0c7f8/>.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, “MENGENAL JAKSA PENGACARA NEGARA,” *Jaksa Pengacara Negara*, t.t., <https://kejari-tojounauna.kejaksaan.go.id/jaksa-pengacara-negara/>.

Kejaksaan Tinggi Riau, “JPN Perkuat Pendampingan Hukum, dari Legal Opinion hingga Pengembalian Aset Daerah,” *JPN Perkuat Pendampingan Hukum, dari Legal Opinion hingga Pengembalian Aset Daerah*, 30 September 2025, <https://keja-riau.kejaksaan.go.id/jpn-perkuat-pendampingan-hukum-dari-legal-opinion-hingga-pengembalian-aset-daerah/>.

Kejaksaan Republik Indonesia, “Apa saja bentuk layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara?,” *Prinsip-Prinsip JPN dalam Memberikan Layanan*, 16 Oktober 2025, <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-EJBF>. Kejaksaan Republik Indonesia Badan

Pendidikan dan Pelatihan, “Pengertian
Kejaksaan,” *Pengertian Kejaksaan*, t.t.,
<https://badiklat.kejaksaan.go.id/pages/pengertian>.
Meilani Teniwut, “Mengenal Perbedaan Kejaksaan Agung,
Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan Tinggi,” *Mengenal
Perbedaan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, dan
Kejaksaan Tinggi*, 22 Juli
2023, [https://mediaindonesia.com/politikdanhukum/59847
1/mengenal](https://mediaindonesia.com/politikdanhukum/598471/mengenal-perbedaan-kejaksaan-agung-kejaksaan-negeri-dan-kejaksaan-tinggi) perbedaan-kejaksaan-agung-kejaksaan-
negeri-dan-kejaksaan-tinggi.